



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)

UNIT KERJA : KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYU
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 629536

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.408.950.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.450.300.000
2. Tanah Seluas 325 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 325 m2/198 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.951.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/40 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 527.650.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/117 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **222.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
2. MOTOR, YAMAHA B3W-S A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000
3. MOTOR, HONDA F1C02N46LO A/T / MODEL: SOLO Tahun 2020, HADIAH Rp. 12.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **40.703.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **136.624.152**



F. HARTA LAINNYA

Rp. 103.115.465

Sub Total

Rp. 5.911.392.617

III. HUTANG

Rp. 472.677.041

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.438.715.576

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.